



**bangga
melayani
bangsa** **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PROSES BISNIS



*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR*



PERMENPAN RB Nomor 19 Tahun 2018

Tentang Proses Bisnis, merupakan panduan teknis dalam penyusunan proses bisnis berbasis kinerja

PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Sistem Kinerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

DASAR HUKUM

01

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2)

02

Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran negara RI Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran RI Nomor 123);

01



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

02



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

03



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);

04



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

05



Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

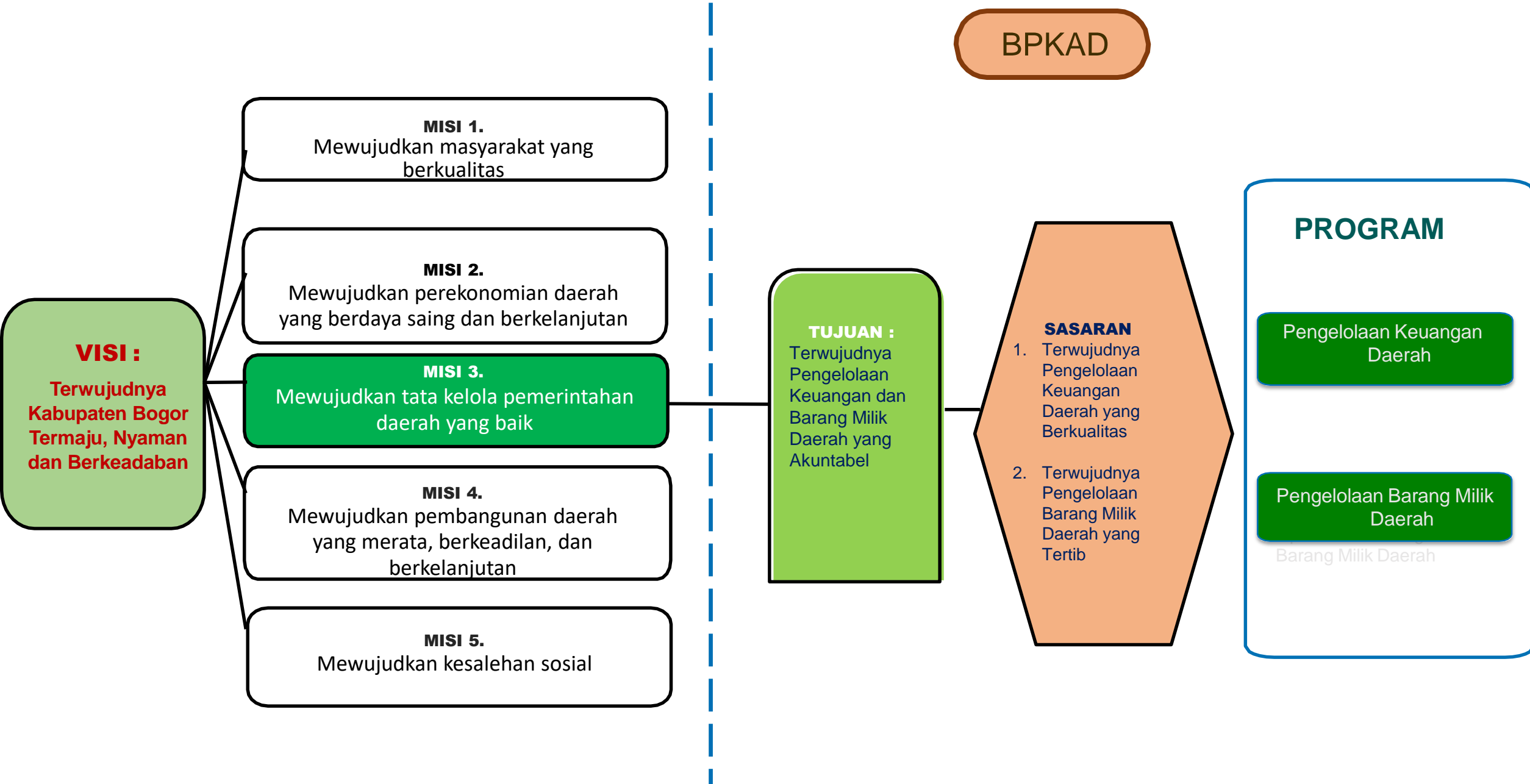
06



Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

07

KETERKAITAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN PERUBAHAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2018 - 2023



TUJUAN BPKAD

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

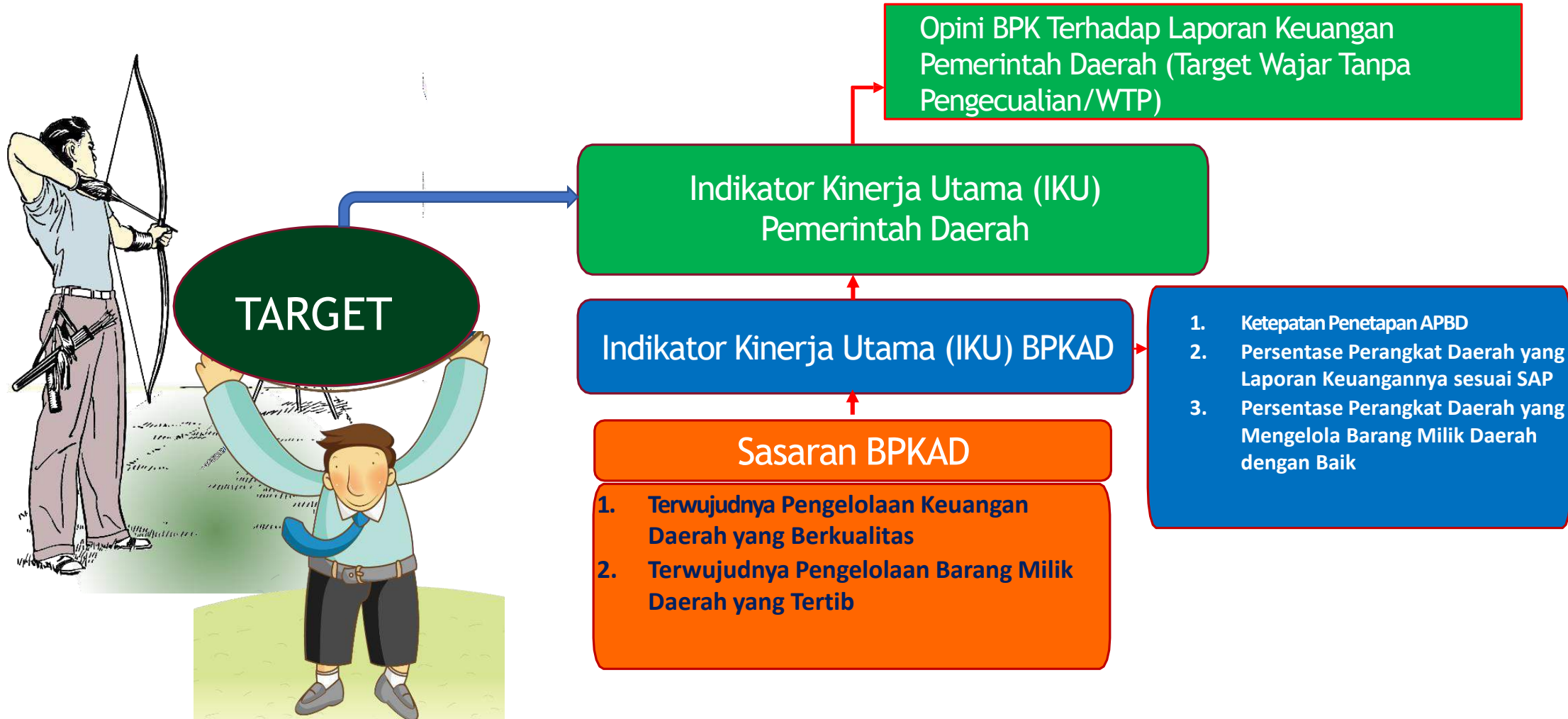
Tugas Pokok

Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Khususnya Penunjang Bidang Keuangan

Fungsi

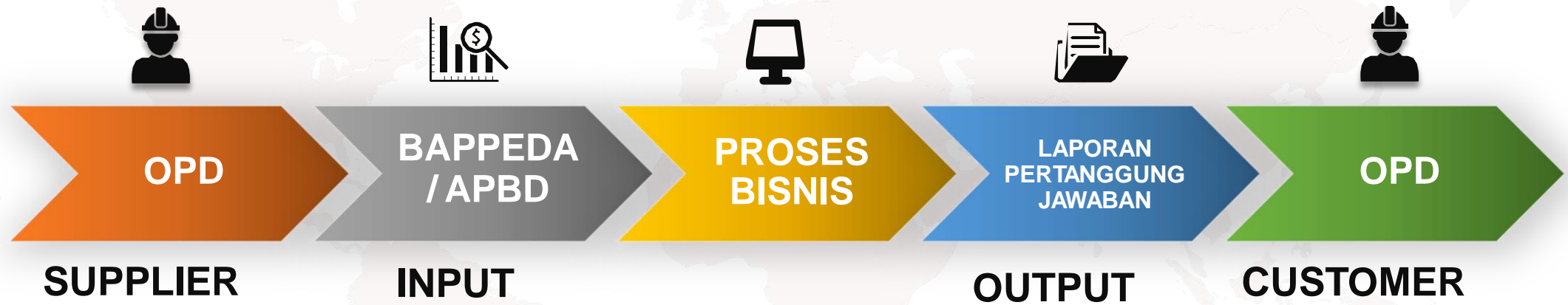
- ❖ Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah
- ❖ Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah
- ❖ Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah
- ❖ Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah
- ❖ Pelaksanaan Administrasi Badan
- ❖ Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya

TUPOKSI BPKAD DALAM MEWUJUDKAN TARGET BUPATI & WAKIL BUPATI BOGOR

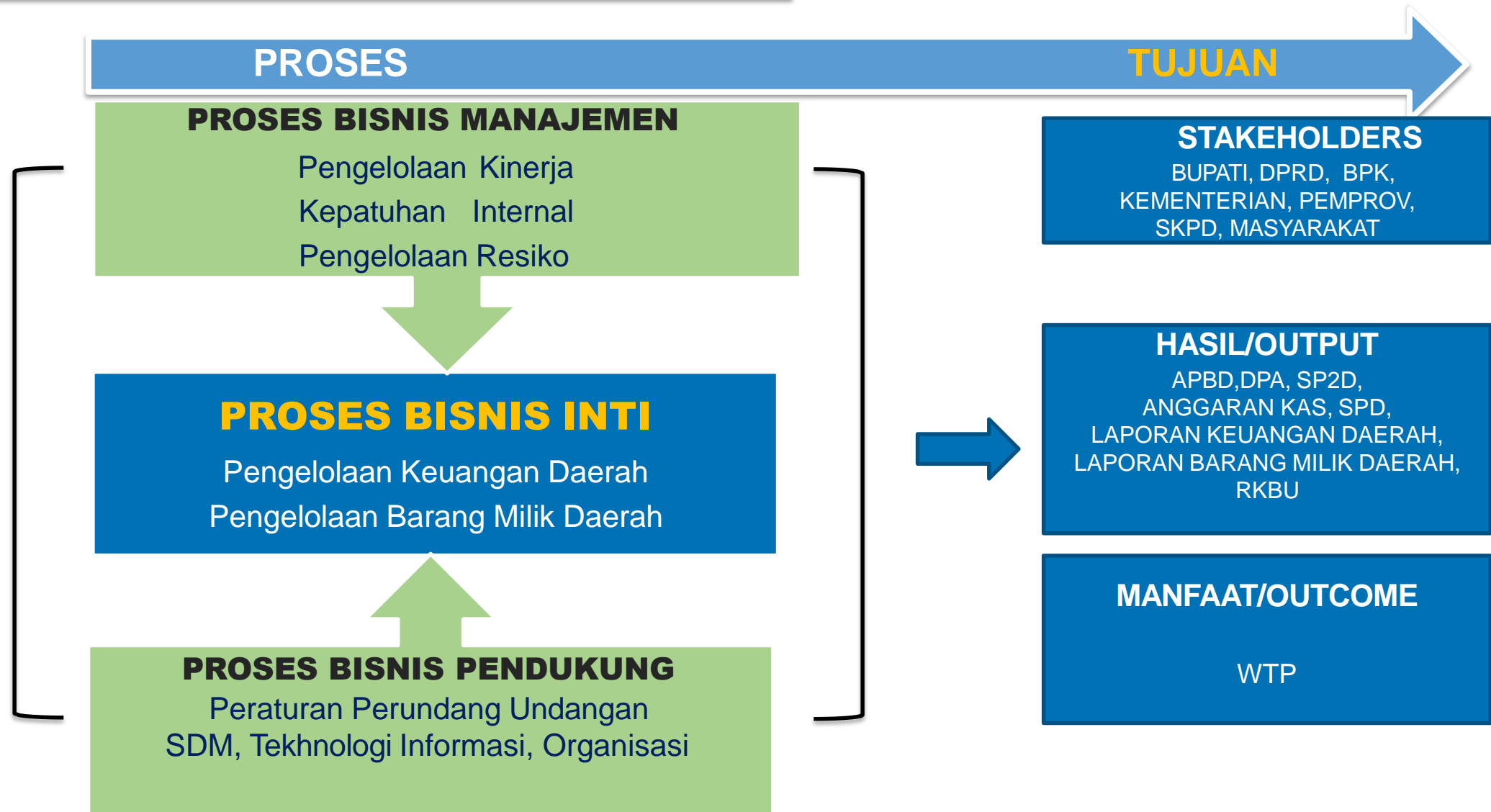


BPKAD mengusung pencapaian salah satu IKU Pemerintah Daerah yaitu **Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** dengan target **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

SKEMA PROSES BISNIS



SKEMA PETA PROSES BISNIS BPKAD



PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN EFEKTIF

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN:

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

TERKELOLANYA KEUANGAN DAERAH DENGAN BAIK

TERKELOLANYA BARANG MILIK DAERAH DENGAN BAIK

INTEGRASI E-PLANNING DAN E-BUDGETING

MONITORING
PELAKSANAAN
BELANJA OPD
SETIAP BULAN

INTEGRASI
PEMBAYARAN NON
TUNAI DALAM
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
DAERAH

EVALUASI DAN
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN APBD

PELAKSANAAN
SENSUS BARANG
DAERAH

PENGINTEGRASIAN
ATISIBADA DENGAN
SIPD

Keselarasn Perencanaan dan
Penganggaran

keselarasn antara SP2D dengan
pihak ketiga /penerima

Keselarasn Data Laporan
Keuangan OPD dengan
Laporan Keuangan Daerah

Keselarasn Data Aset

Pengelolaan Kinerja :

Menyelaraskan SOP sesuai dengan visi dan misi. Dalam Pengelolaan Kinerja BPKAD selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :

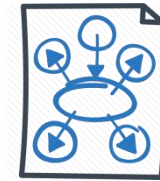
Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Pengelolaan Resiko:

Memaksimalkan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul



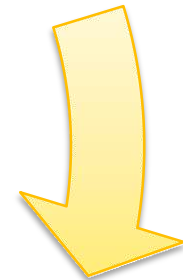
Evaluasi Kinerja



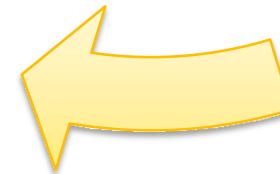
Perencanaan Kinerja



Pengelolaan Kinerja



Pelaporan Kinerja

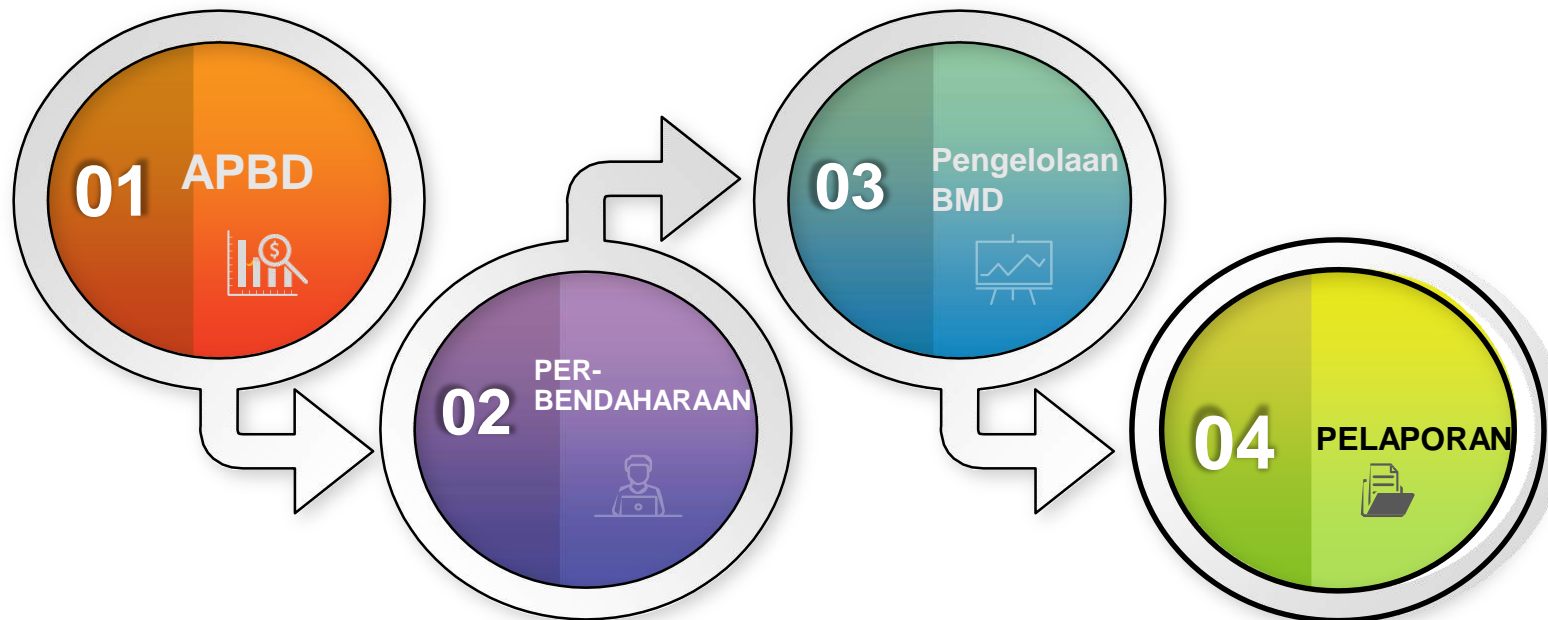
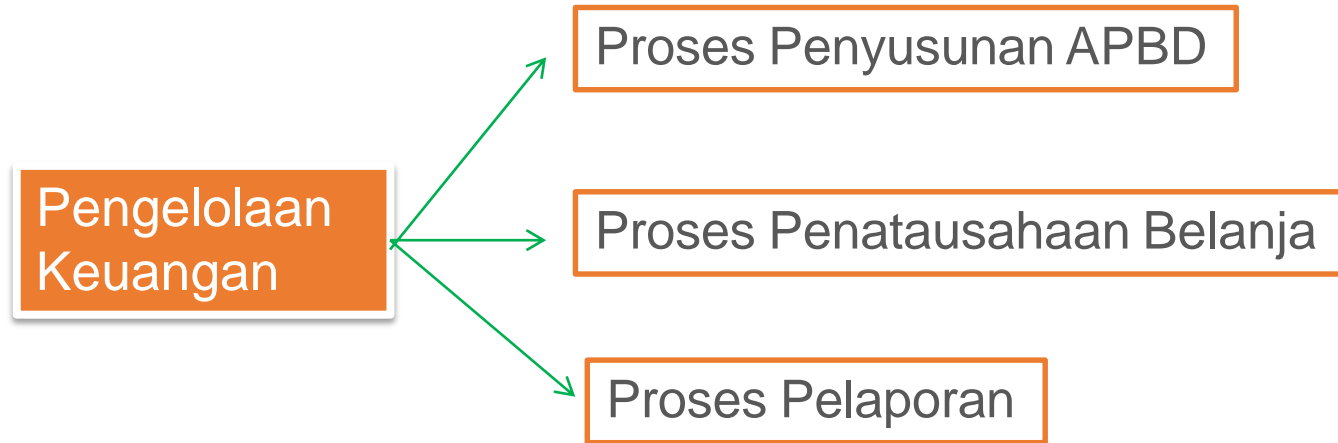


Pengukuran Kinerja

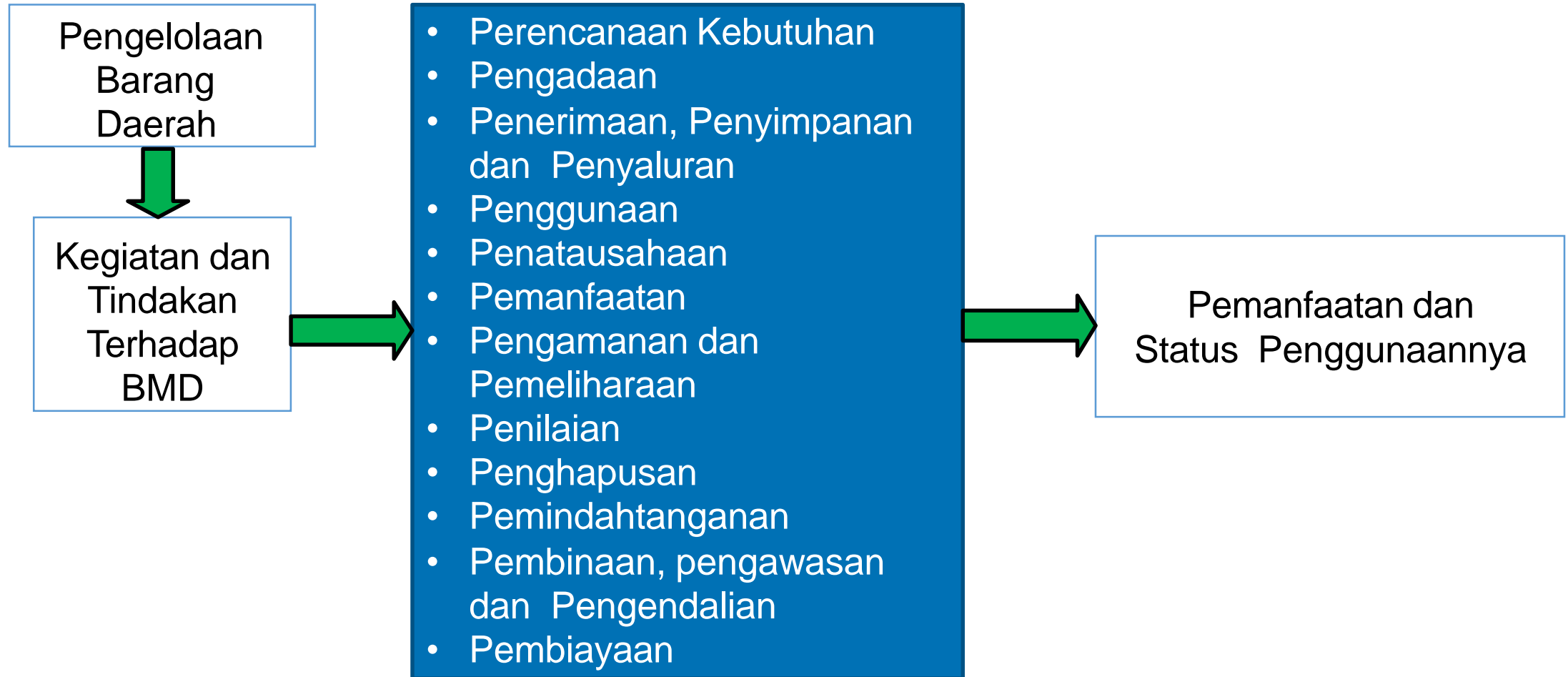


PROSES BISNIS INTI

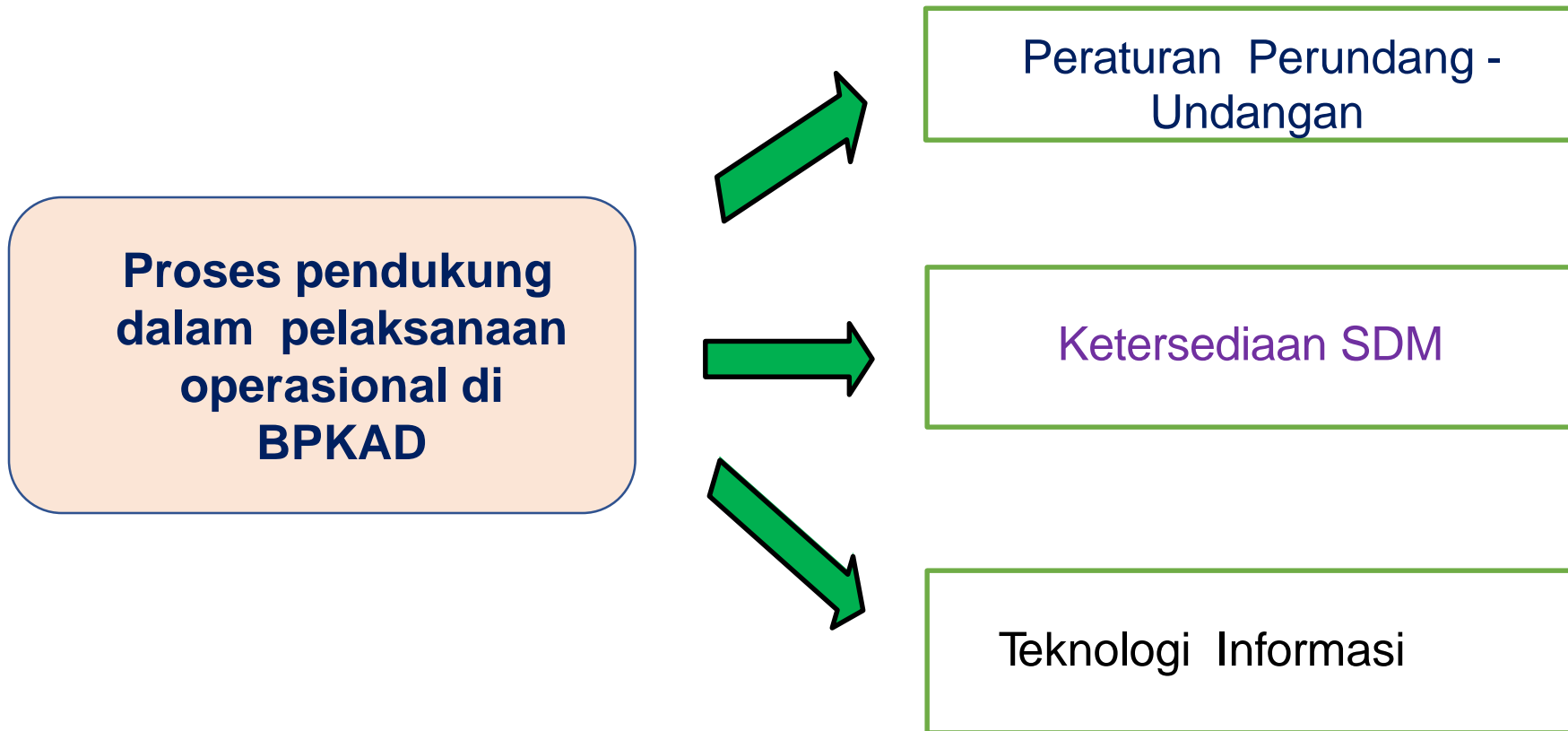
1. Pengelolaan Keuangan



2. Pengelolaan Barang Milik daerah



PROSES BISNIS PENDUKUNG



PROSES BISNIS PENDUKUNG

Teknologi Informasi/ Aplikasi SIPD/ SIMRAL/ ATISISBADA



ADMIN



SERVER SAKTI :

1. Modul Perencanaan
2. Modul Penganggaran
3. Modul Perbendaharaan
3. Modul Akuntansi
4. Modul Aset



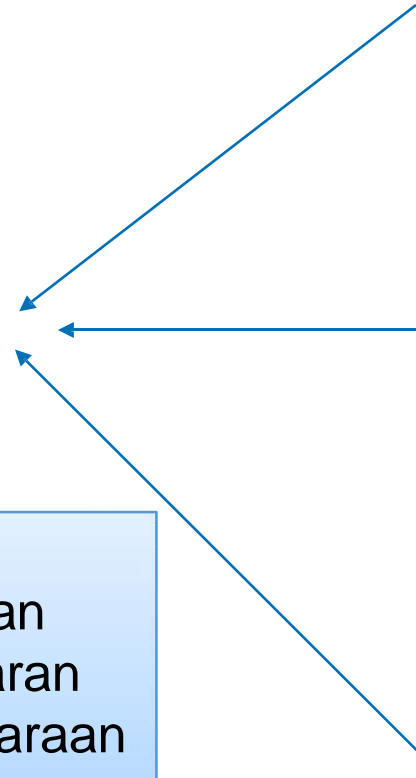
SKPD



SKPD

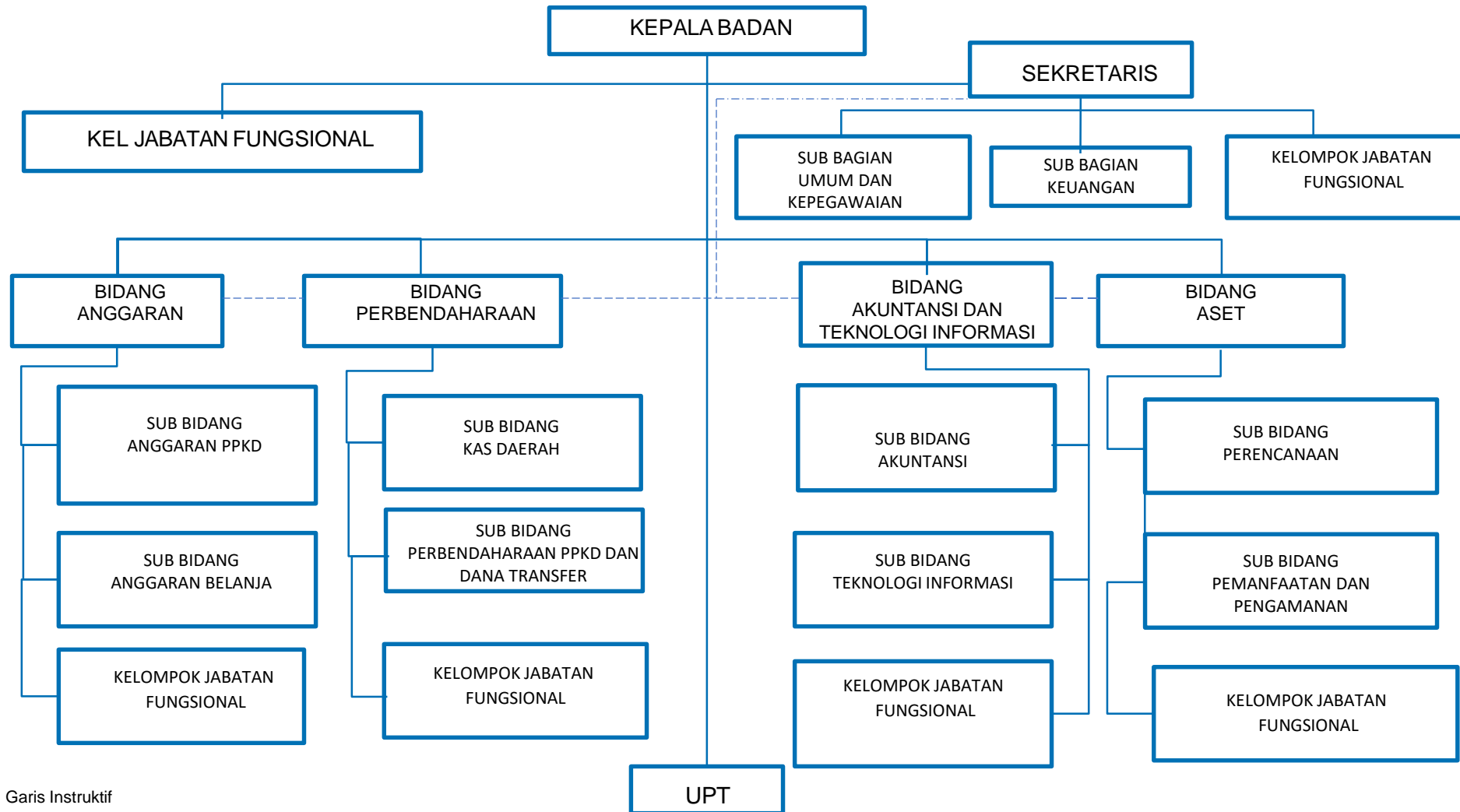


SKPD



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KABUPATEN BOGOR

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



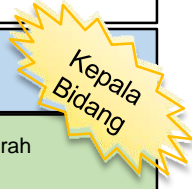
KETERANGAN :

- : Garis Instruktif
- : Garis Koordinatif

PERENCANAAN KINERJA BPKAD

TUJUAN RPJMD
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN RPJMD
INDIKATOR SASARAN <i>(IKU KEPALA DAERAH)</i>
TUJUAN RENSTRA BPKAD
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN RENSTRA BPKAD
INDIKATOR SASARAN <i>(IKU KEPALA BPKAD)</i>
SASARAN PROGRAM
PROGRAM BPKAD
INDIKATOR PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
KEGIATAN BPKAD
INDIKATOR KEGIATAN
PENANGUNGJAWAB

Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas			
Indeks Reformasi Birokrasi			
Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif			
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel			
Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar			
1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas		2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	
1. Ketepatan Penetapan APBD	2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP		
Terkelolanya Keuangan Daerah Dengan Baik			
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			
1. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum dikurangi transfer expenditures	4. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	
3. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan			
Terlaksananya Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah	1. Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah	1. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah	
2. Terlaksananya Pengelolaan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan	2. Terlaksananya Pengelolaan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan		
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	2. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	1. Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Daerah	
	2. Persentase Pengelolaan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan		
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik di Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah		
Manajemen Aset			
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah			
BIDANG ANGGARAN	BIDANG PERBENDAHARAAN	BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BIDANG ASET DAERAH



SASARAN SUB KEGIATAN	Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bogor yang tersusun	Tersedianya Dokumen SP2D Belanja Operasi, Advis Belanja Operasi, Laporan Kas, Lembar Penelitian SP2D Belanja Operasi dan Register SP2D yang tersedia	Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Sub Kegiatan Kooordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Bogor yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
PENANGUNGGJAWAB	SUB BID ANALISA KEBIJAKAN PADA BIDANG ANGGARAN	SUB BID KASDA PADA BIDANG PERBENDAHARAAN	SUB BIDANG AKUNTANSI PADA BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BID PENATUSAHAAN PADA BIDANG ASET DAERAH
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Bogor	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
PENANGUNGGJAWAB	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN PADA SUB BID ANALISA KEBIJAKAN ANGGARAN	ANALIS PERBENDAHARAAN PADA SUB BID KAS DAERAH	ANALIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SUB BIDANG AKUNTANSI	ANALISI KLASIFIKASI BARANG MILIK DAERAH PADA SUB BID PENATAUSAHAAN

Kasubid (Eselon IV)

Pelaksana (IKJ)

POHON KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERKUALITAS

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN EFEKTIF

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERTIB

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI BPKAD

KETEPATAN PENETAPAN APBD

PERSENTASE JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAP

PERSENTASE JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGELOLA BMD DENGAN BAIK

TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

TERKELOLANYA KEUANGAN DAERAH DENGAN BAIK

TERKELOLANYA BARANG MILIK DAERAH DENGAN BAIK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Terfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

- Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum dikurangi transfer expenditures
- Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Manajemen Aset

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Keuangan

Terlaksananya Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah

- Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah
- Terlaksananya Pengelolaan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan

- Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah
- Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik di Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah

- Persentase Penerbitan SP2D yang diajukan oleh Perangkat Daerah
- Persentase Pengelblaan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan

Laporan Keuangan

Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah

Sekretariat

Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

Kepala Bidang Aset Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tersedianya Dokumen SP2D Belanja Operasi, Advis Belanja Operasi, Laporan Kas, Lembar Penelitian SP2D Belanja Operasi dan Register SP2D yang tersedia

Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah

Sub Bag Program dan Pelaporan

Sub Bid Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran

Sub Bid Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan

Sub Bid Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

Sub Bid Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah

Tersusunnya Dokumen Perubahan RENSTRA, RENJA, Perubahan RENJA

Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah

Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan

Analisis Perencanaan Anggaran pada Sub Bidang Anggaran Belanja

Analisis Perbendaharaan pada Sub Bidang Kas Daerah

Analisis Akuntansi pada Sub Bidang Akuntansi

Analisis Klasifikasi Barang Milik Daerah Pada Sub Bid Pemanfaatan Bidang Aset Daerah

VISI

MISI

TUJUAN BPKAD

SASARAN BPKAD

Indikator Sasaran BPKAD

Sasaran Program

Indikator Program

Sasaran Kegiatan

Indikator Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

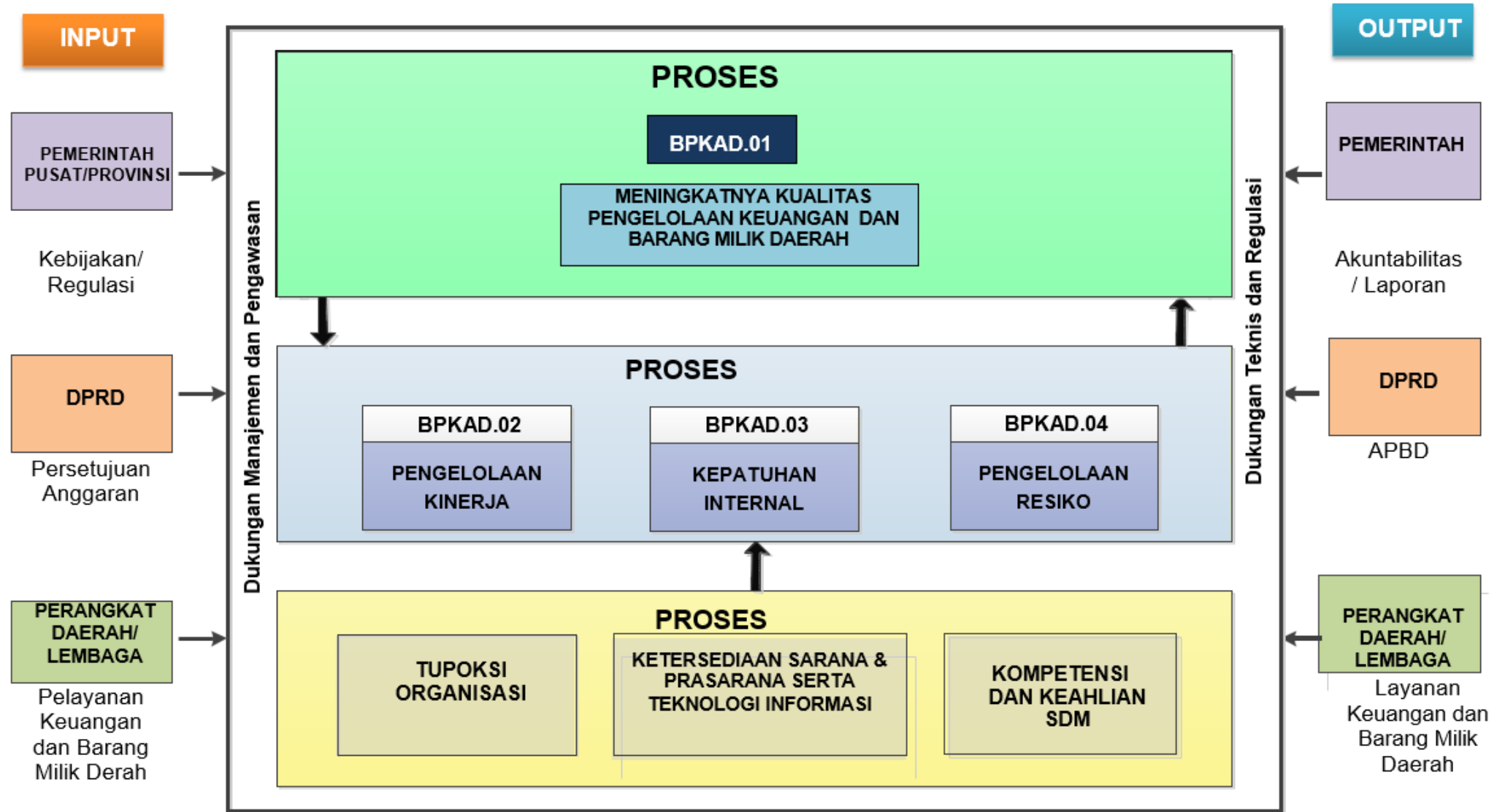
I
K
I

CASCADING KINERJA BPKAD KABUPATEN BOGOR

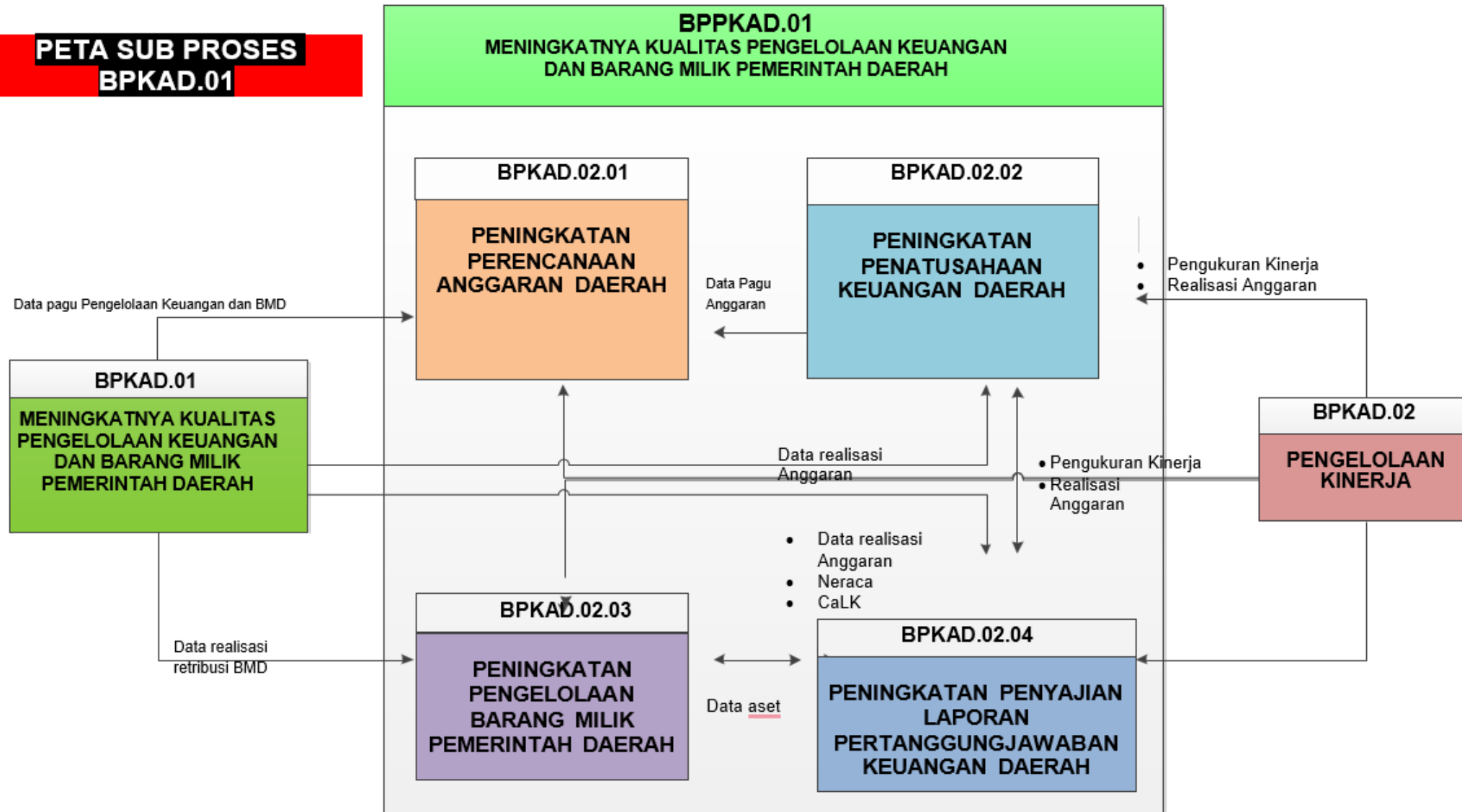
SASARAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR



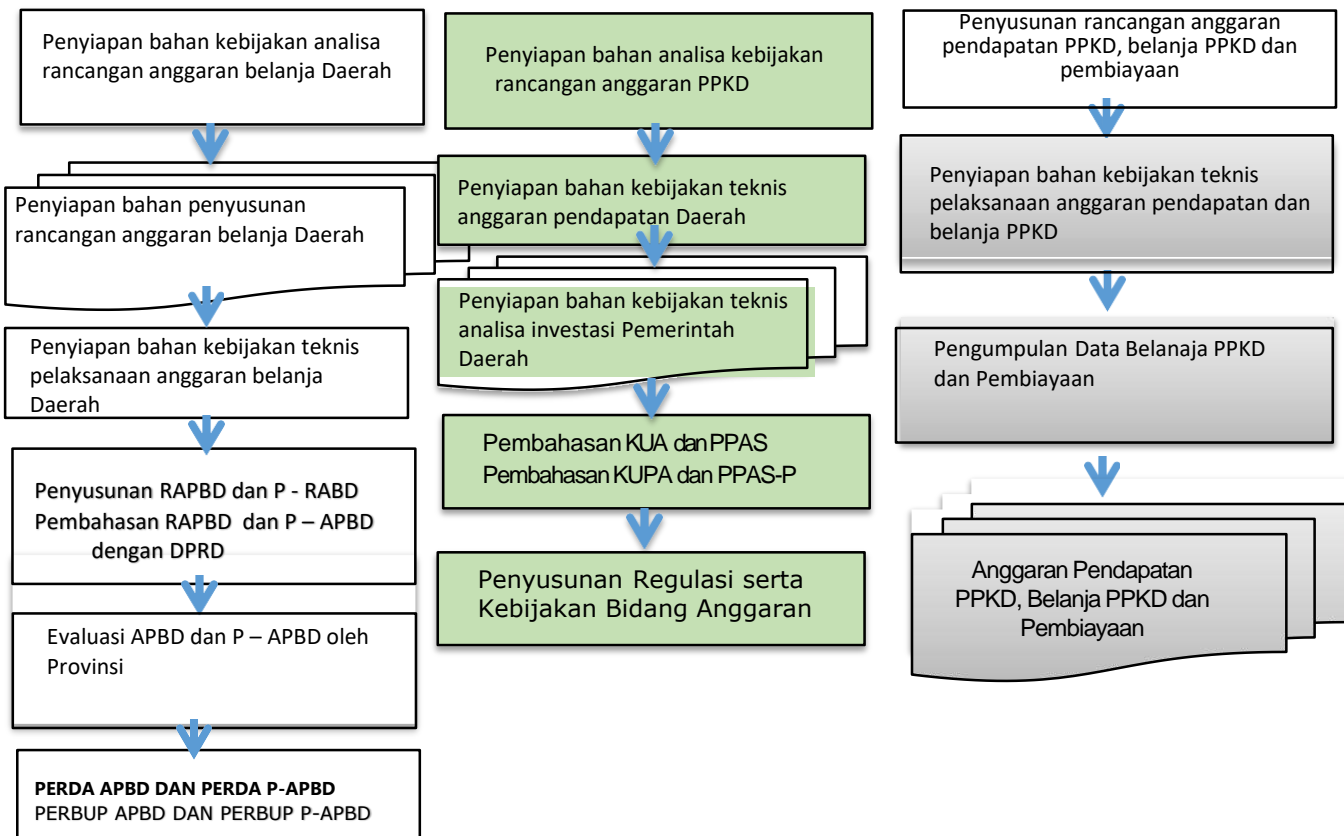
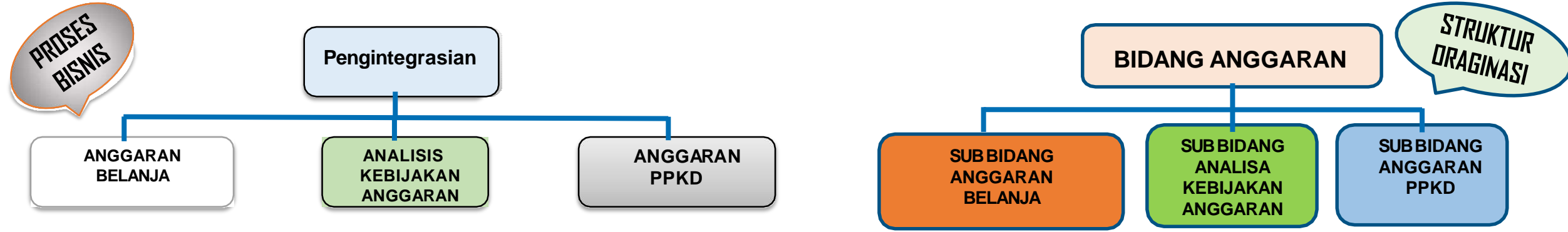
PETA PROSES BISNIS BPKAD KABUPATEN BOGOR



**PETA SUB PROSES
BPKAD.01**



Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

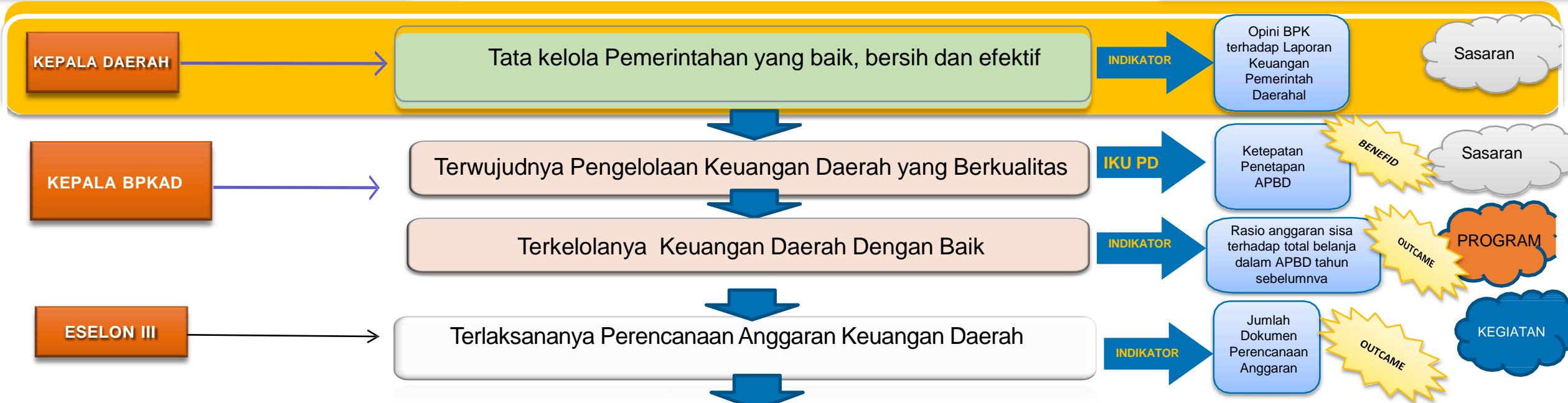


Program Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA	SUB BIDANG ANALISA KEBIJAKAN ANGGARAN	SUB BIDANG ANGGARAN PPKD
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		

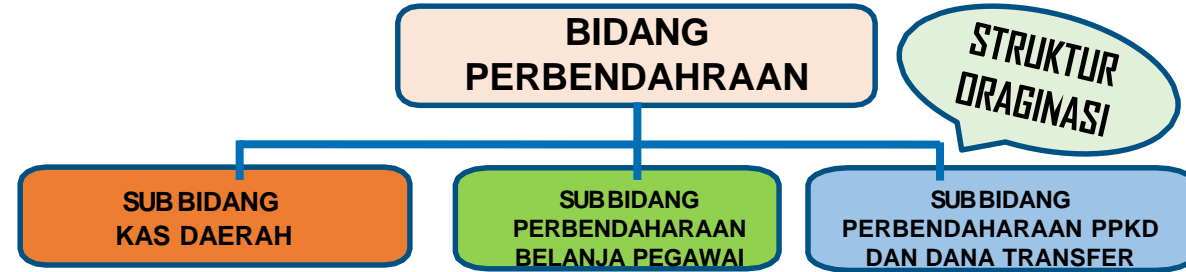
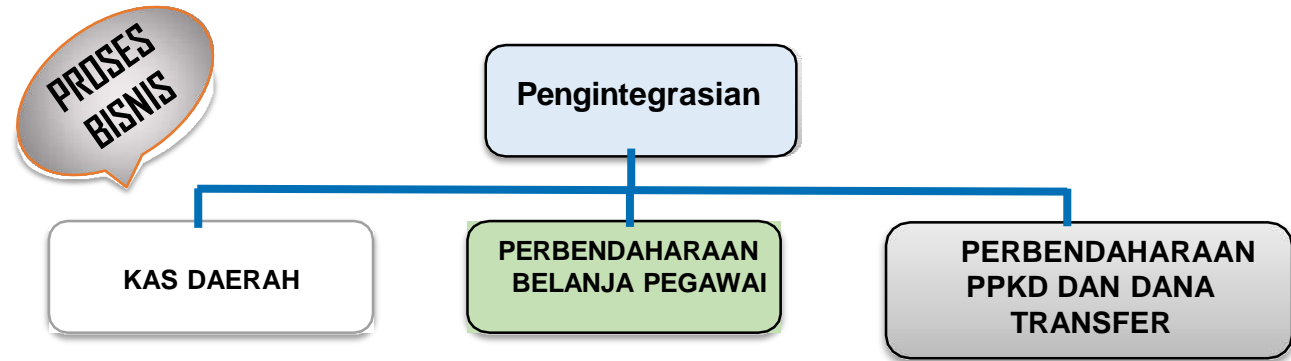
POHON KINERJA

CROSS CUTTING



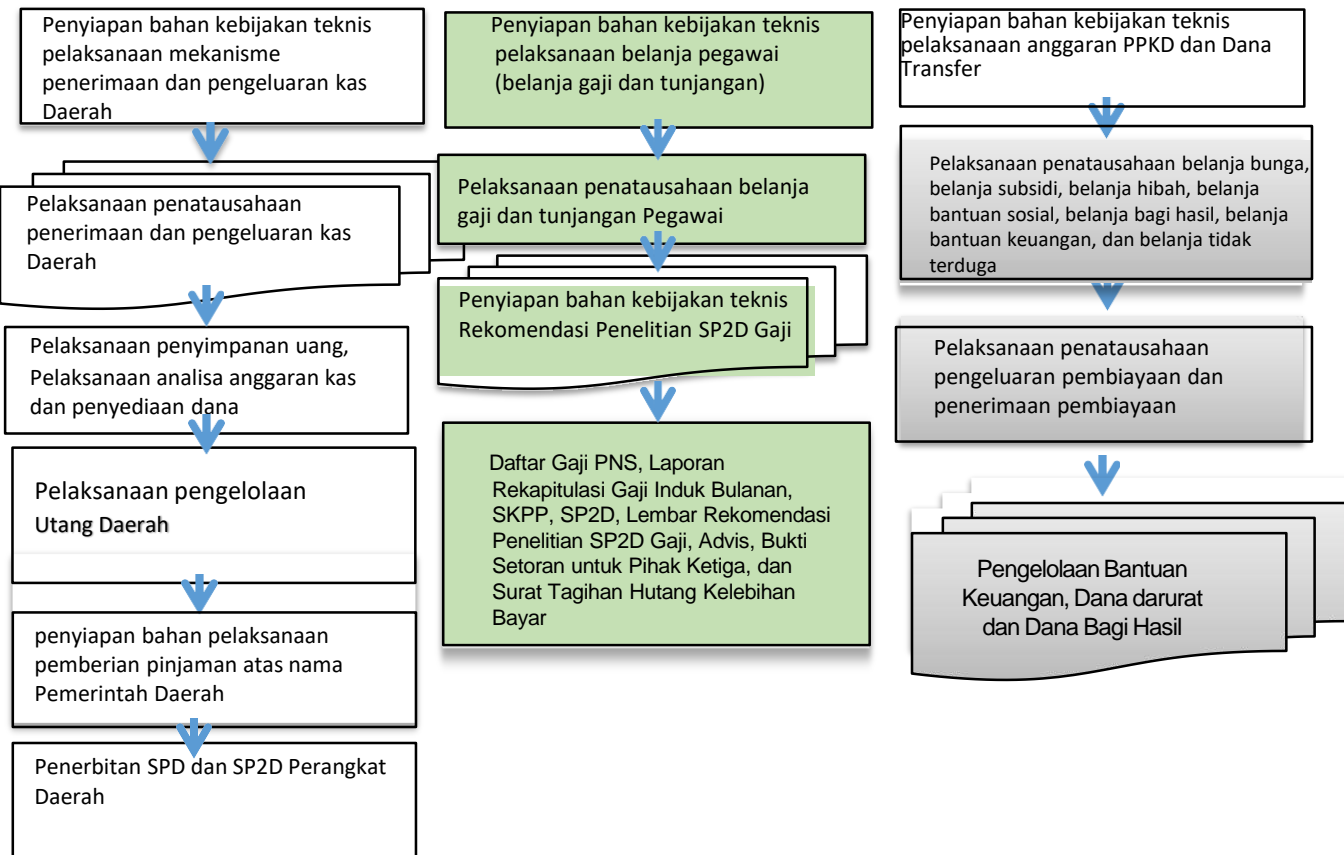
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
Terlaksananya Verifikasi Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang di teliti dan diverifikasi	Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Bogor yang tersusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Bogor yang tersusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan yang tersusun
Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang di teliti dan diverifikasi	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Bogor yang tersusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Bogor yang tersusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang tersusun
1. Tersedianya Dokumen Rancangan Perda tentang APBD yang tersusun 2. Dokumen Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD yang tersusun	1. Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD yang tersusun	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembiayaan Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembiayaan Daerah yang tersusun
1. Tersedianya Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang tersusun 2. Dokumen Rancangan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	1. Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Rancangan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	Tersedianya Dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBD yang tersusun	Jumlah Dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBD yang tersusun		

Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



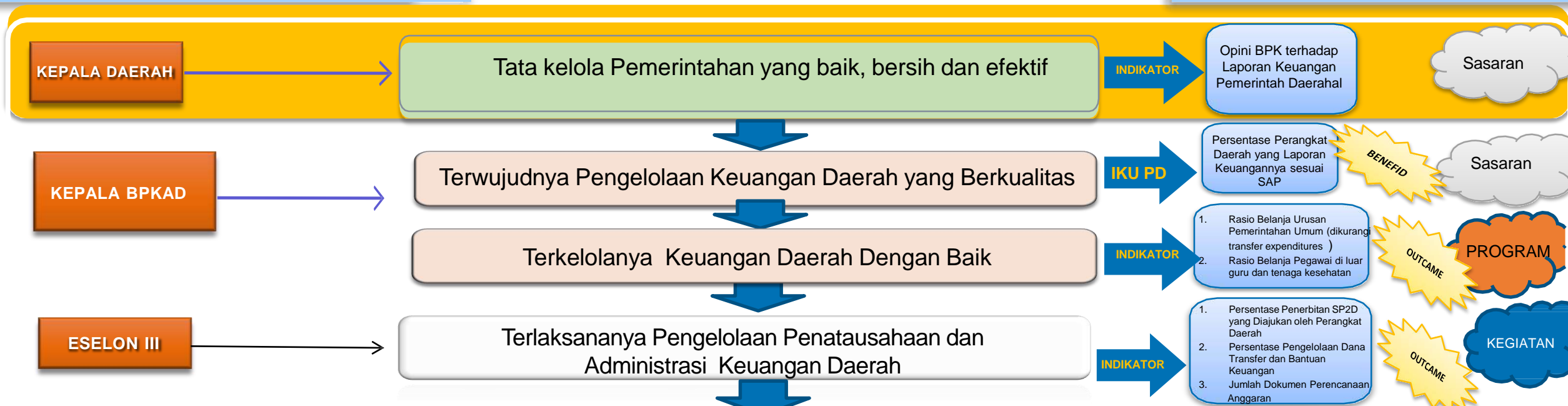
Program Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB BIDANG KAS DAERAH	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA PEGAWAI	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN PPKD DAN DANA TRANSFER
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		



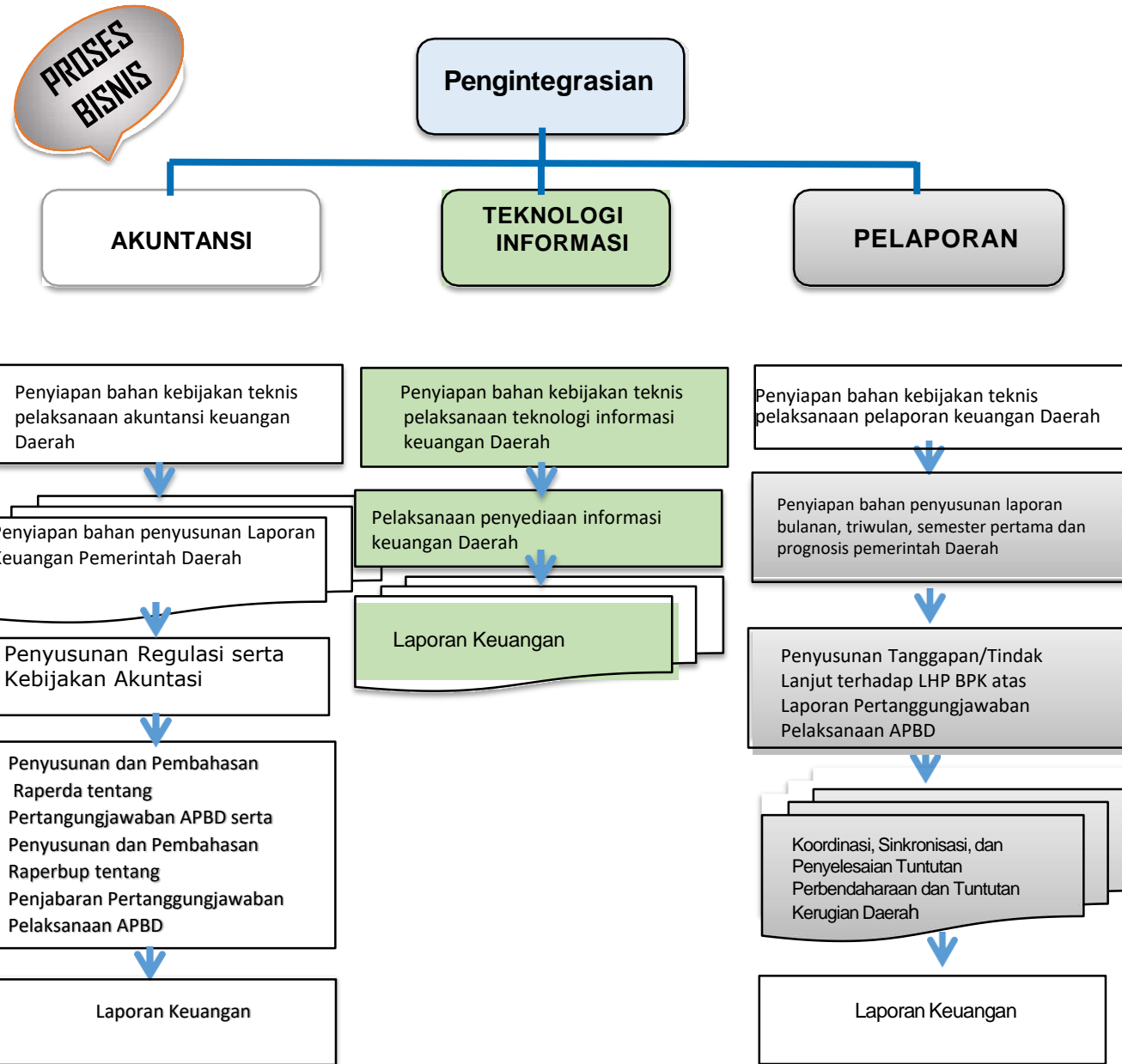
POHON KINERJA

CROSS CUTTING



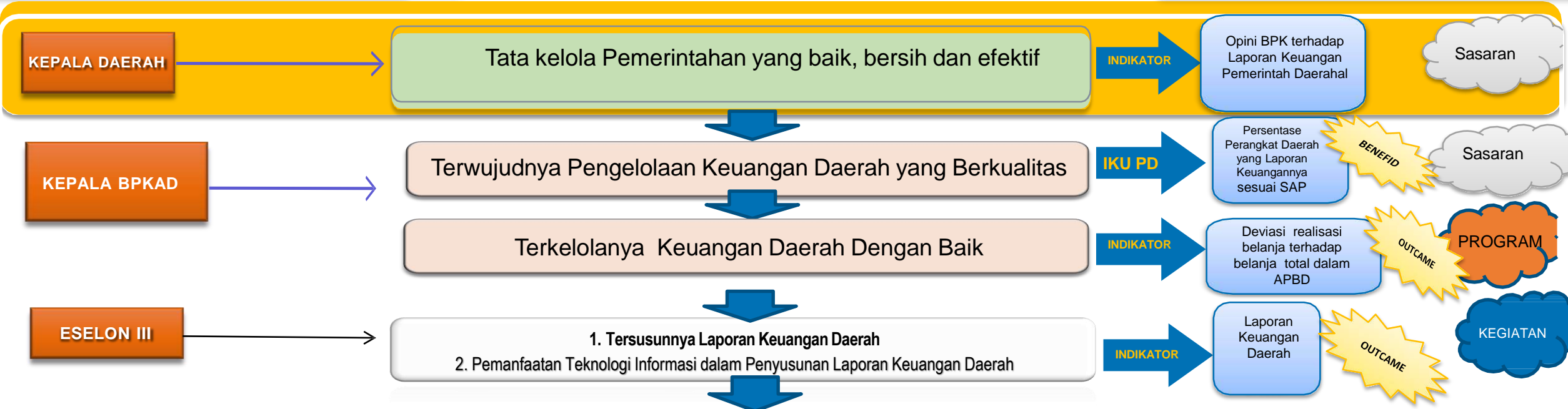
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
Tersedianya Dokumen SP2D Belanja Operasi, Advis Belanja Operasi, Laporan Kas, Lembar Penelitian SP2D Belanja Operasi dan Register SP2D yang tersedia	Jumlah Dokumen SP2D Belanja Operasi, Advis Belanja Operasi, Laporan Kas, Lembar Penelitian SP2D Belanja Operasi dan Register SP2D yang tersedia	Tersedianya Daftar Gaji PNS, Laporan Rekapitulasi Gaji Induk Bulanan, SKPP, SP2D, Lembar Rekomendasi Penelitian SP2D Gaji, Advis, Bukti Setoran untuk Pihak Ketiga, dan Surat Tagihan Hutang Kelebihan Bayar	Jumlah Dokumen Daftar Gaji PNS, Laporan Rekapitulasi Gaji Induk Bulanan, SKPP, SP2D, Lembar Rekomendasi Penelitian SP2D Gaji, Advis, Bukti Setoran untuk Pihak Ketiga, dan Surat Tagihan Hutang Kelebihan Bayar	Tersedianya Dokumen belanja bantuan pembiayaan dan belanja tak terduga yang tersedia (SPP dan SPM)	Jumlah Dokumen belanja bantuan pembiayaan dan belanja tak terduga yang tersedia (SPP dan SPM)
Surat penyediaan dana yang tersedia	Jumlah Surat penyediaan dana yang tersedia	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Tersedianya Laporan pengelolaan dana transfer yang tersusun	Jumlah laporan pengelolaan dana transfer yang tersusun
Tersedianya Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersedia	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersedia			Tersedianya Dokumen laporan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah dokumen laporan penyaluran bantuan keuangan
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas yang tersedia	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas yang tersedia			Tersedianya Dokumen laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak
Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang tersedia	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang tersedia			Tersedianya Dokumen laporan pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten
Peserta yang mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah				
Terlaksananya Verifikasi Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang di teliti dan diverifikasi				
Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang di teliti dan diverifikasi				

Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



POHON KINERJA

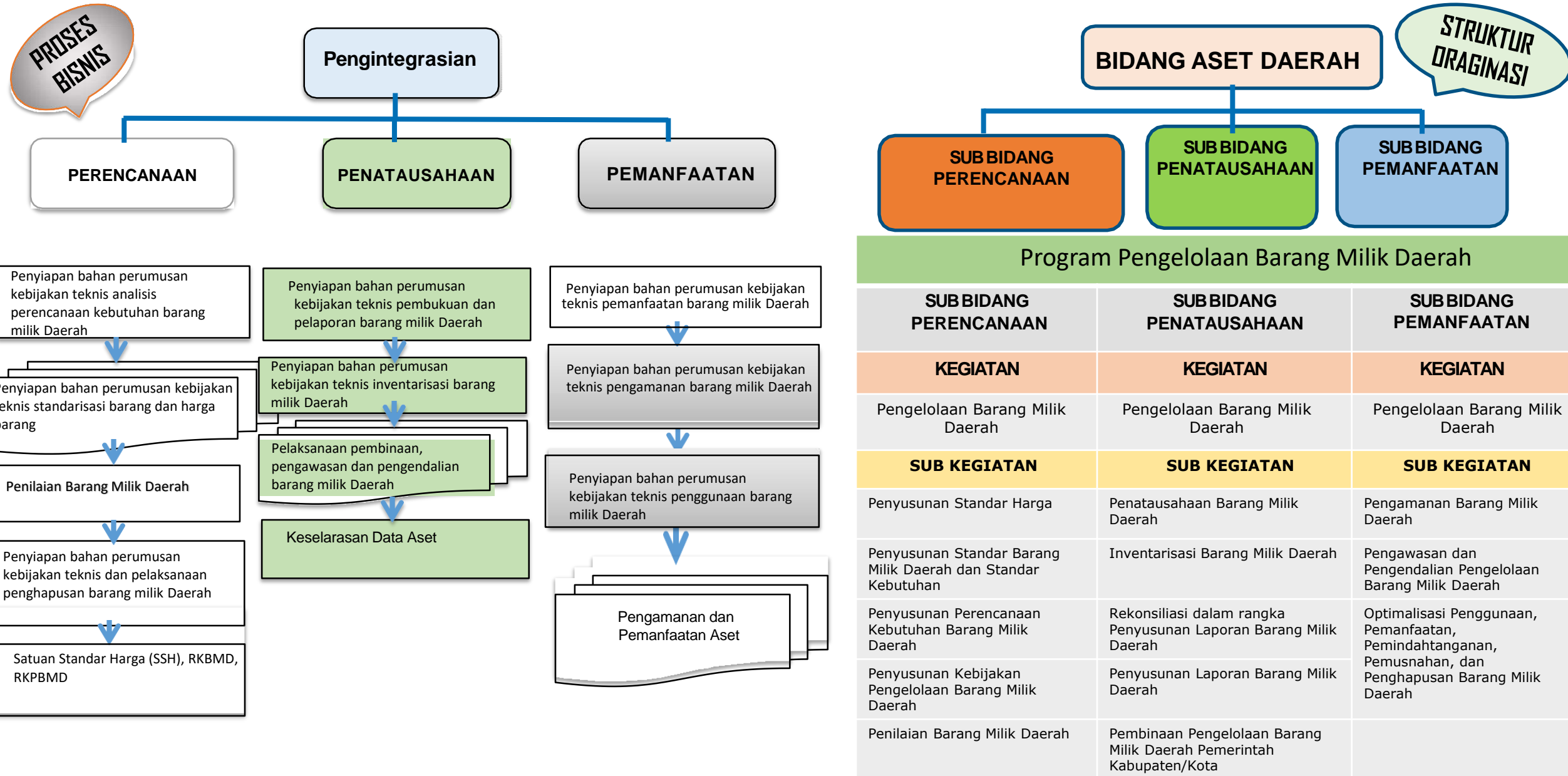
CROSS CUTTING



Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
Transaksi keuangan harian yang telah dilakukan Jurnal Validasi	Jumlah transaksi keuangan harian yang di jurnal	Terfasilitasinya Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Triwulanan, Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Triwulanan, Laporan Realisasi Semester pertama dan Prognosis
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Hasil Review Perangkat Daerah, BLUD yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Hasil Review Perangkat Daerah, BLUD yang tersusun	Terfasilitasinya Perangkat Daerah yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Realisasi Semester pertama dan Prognosis	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Semester pertama dan Prognosis
Tersedianya Dokumen Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun			Tersedianya Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tersusun	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tersusun
Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah				
1. Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang tersusun 2. Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang tersusun	1. Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang tersusun			Terlaksananya Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

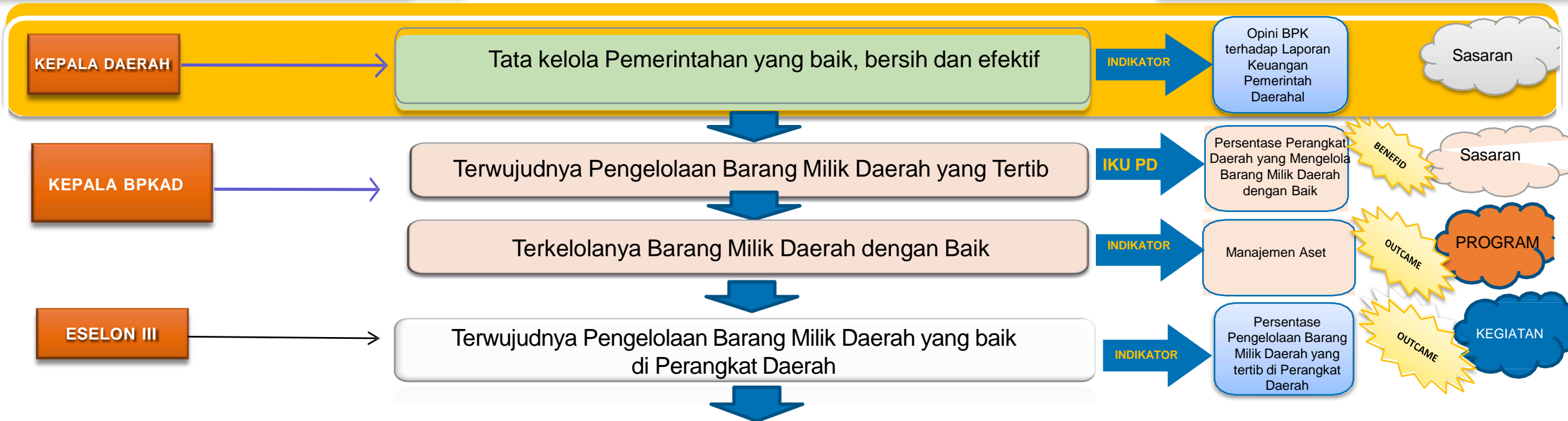


Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



POHON KINERJA

CROSS CUTTING



	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
ESELON IV	Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa	Modul Penatusahaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Aplikasi ATISISBADA	Jumlah Pengembangan Modul Penatusahaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Aplikasi ATISISBADA	Bidang tanah yang diamankan	Jumlah Bidang tanah yang diamankan
	Dokumen DKBMD dan Dokumen DKPBMD yang tersusun	Jumlah Dokumen DKBMD dan Dokumen DKPBMD yang tersusun	Dokumen Daftar Barang Milik Daerah Hasil Inventarisasi yang tersusun	Jumlah Dokumen Daftar Barang Milik Daerah Hasil Inventarisasi yang tersusun	Dokumen Rancangan SK Bupati tentang Pemanfaatan Barang yang tersusun	Jumlah Dokumen Rancangan SK Bupati tentang Pemanfaatan Barang yang tersusun
	Dokumen RKBMD dan Dokumen RKPBMMD yang tersusun	Jumlah Dokumen RKBMD dan Dokumen RKPBMMD yang tersusun	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Benar dan Akurat Hasil Rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Benar dan Akurat Hasil Rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah	Bidang tanah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Bidang tanah yang memiliki dokumen kepemilikan
	Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan RKBMD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan RKBMD	Dokumen Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengadaan Belanja Modal dan Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun		
	Dokumen Hasil Penilaian Aset Daerah dan SK Penghapusan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Aset Daerah dan SK Penghapusan yang tersusun	Peserta yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		

